

ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN POLITIK DINASTI JOKOWI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI MEDIA ONLINE

Abdul Aziz¹⁾ dan Umaimah Wahid²⁾

^{1,2)} Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur
Email Address : umaimah.wahid@budiluhur.ac.id

Tanggal diterima: 26-1-2021

Tanggal direvisi: 21-2-2021

Tanggal disetujui: 10-8-2021

ABSTRACT

Dynastic politics has always been an issue that has attracted public attention to be discussed during the Regional Head Election (Pilkada) process. This is because in reality there is a tendency in many regional heads to try to build dynastic politics. The simultaneous Regional Head Election (Pilkada) in 2020 is quite interesting with several candidates emerging from the family of President Jokowi. This study aims to determine how online media of kompas.com and okezone.com in framing news about dynastic politics in the 2020 Pilkada. To achieve this goal, this study uses a qualitative research method, where the author uses the framing analysis model of Robert N. Entman. The object of this research is news regarding the politics of President Jokowi's dynasty, in online media kompas.com and okezone.com. The data collection technique used literature study. The results of the analysis of this study present news about dynastic politics in the 2020 Pilkada. In the results of the news framing analysis using the Robert N. Entman model, there are several stages such as problem definition, problem estimation from problem sources, moral decision making, and problem solving. The news on kompas.com clearly highlighted news that was contra or disagreeable with the existence of dynastic politics in Indonesia, especially in the 2020 Pilkada, while the news on okezone.com clearly did not question the existence of dynastic politics in the 2020 Pilkada. The victory of the two PDI-Perjuangan candidates is part of the General Chair's commitment to ensure that his party leads to produce quality young leadership. Of course, the imbalance in the selection of sources in the news is very important so that people who see it can provide a more objective opinion of the news.

Keywords: *dynastic Politics, 2020 Pilkada, online media, framing analysis.*

© 2021 MetaCommunication: Journal of Communication Studies

How to cite: Azis, A., & Wahid, U. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Politik Dinasti Jokowi pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Media Online. *MetaCommunication: Journal of Communication Studies*, 6(2), 131-144.

ABSTRAK

Politik dinasti selalu menjadi isu yang menarik perhatian masyarakat untuk dibahas saat proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal tersebut dikarenakan dalam realitanya ada kecenderungan beberapa kepala daerah berupaya membangun politik dinasti. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 ini cukup menarik perhatian dengan beberapa kandidat muncul dari keluarga Presiden Jokowi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui media online kompas.com dan okezone.com dalam membingkai berita tentang politik dinasti pada Pilkada 2020. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penulis menggunakan model analisis framing dari Robert N. Entman. Objek penelitian ini adalah berita menyangkut politik dinasti Presiden Jokowi, di media online kompas.com dan okezone.com. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Hasil analisis penelitian ini menampilkan pemberitaan tentang politik dinasti pada Pilkada tahun 2020. Dalam hasil analisis framing berita menggunakan model Robert N. Entman, ada beberapa tahapan seperti definisi masalah, perkiraan masalah dari sumber masalah, pembuatan keputusan moral, dan penyelesaian masalah. Pemberitaan pada kompas.com secara jelas menonjolkan berita yang kontra atau tidak setuju dengan adanya politik dinasti yang ada di Indonesia, khususnya pada Pilkada 2020 ini, sedangkan pemberitaan pada okezone.com secara jelas tidak mempermasalahkan adanya politik dinasti

pada Pilkada 2020 ini. Kemenangan kedua calon PDI-Perjuangan itu merupakan bagian dari komitmen Ketua Umum untuk memastikan partai pimpinannya menghasilkan kepemimpinan muda berkualitas. Tentu dengan ketidakberimbangan dalam pemilihan narasumber dalam pemberitaan sangatlah penting agar masyarakat yang melihat dapat memberikan opini yang lebih obyektif dari berita tersebut.

Kata Kunci: politik dinasti, Pilkada 2020, media online, analisis framing.

PENDAHULUAN

Isu politik dinasti dalam jaringan pemerintahan di Indonesia tampak terus menjadi fenomena yang menarik. Hal tersebut dikarenakan dalam realitanya ada kecenderungan beberapa kepala daerah berupaya membangun politik dinasti untuk mendukung kinerjanya dalam suksesi kepemimpinan nasional. Setelah melewati beberapa tahun demokrasi Indonesia berjalan, ternyata demokrasi di Indonesia mengalami ujian dengan munculnya fenomena politik dinasti tersebut.

Pengaruh kelompok elit di tingkat lokal menjadi cikal bakal lahirnya dinasti politik yang tumbuh seiring dengan proses demokratisasi yang diwujudkan dalam otonomi daerah. Ada kecenderungan kepala daerah melakukan praktik dinasti politik, dengan mewariskan kekuasaan kepada orang terdekat atau kerabatnya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Mahalnya biaya politik, serta macetnya fungsi kaderisasi partai mengakibatkan terjadinya pragmatisme, yaitu dengan mengusung para elite (para pemodal) tersebut dalam kontestasi Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Ini menciptakan pasar gelap dalam demokrasi, yaitu kekuasaan yang diperoleh melalui transaksi jaringan patronasi dan konsesi politik. Serta partai politik telah dikendalikan,

partai menjadi arena konspirasi antara rezim partai dan penguasa lokal (Herman & As'ad, 2016).

Perkembangan politik dinasti tampak dimulai dengan munculnya kekerabatan dalam pencalonan anggota legislatif dan pencalonan kepala daerah, dan isu yang belakangan muncul adalah dalam suksesi kepemimpinan nasional. Seringkali isu tentang pemberitaan politik dinasti muncul ketika ada penyelenggaraan Pilkada, yang kemudian terus diikuti perkembangan wacana pro dan kontra atas keberadaannya dalam sistem pemerintahan.

Sementara itu di tingkat politik lokal, Provinsi Kepulauan Riau misalnya, kemunculan Maya Suryanti putri Walikota Suryatati Abdul Manan dalam bursa Calon Walikota Tanjungpinang dan Aida Ismeth dalam Pilkada Kepulauan Riau Tahun 2010 adalah bukti fenomena *political dynasty* atau dinasti politik. Politik di Indonesia masih dipengaruhi *local strongmen* atau “orang kuat lokal” dan roving bandits atau “bandit yang berkeliaran”. Oleh karena itu, meskipun mengalami transformasi politik lebih satu dekade, demokrasi di tingkat lokal masih terpenjara oleh kepentingan elit politik lokal (Bathoro, 2011).

Daerah lain seperti Provinsi Banten misalnya, jejak-jejaknya lebih kentara. Ratu

Atut Choisyah, Gubernur Banten 2007-2012, keluarga besarnya memiliki setidaknya sembilan orang yang orang yang memimpin di masing-masing “kerajaannya”. Ratu Atut Choisyah memimpin Banten, suaminya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan putranya menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Menantu Ratu Atut merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, begitu pula adiknya menjadi anggota DPRD Banten. Adik tiri Ratu Atut mejadi Wakil Wali Kota Serang, sedangkan ibu tirinya menjadi anggota DPRD Kabupaten Pandeglang. Ia memiliki ibu tiri lainnya yang menjabat anggota DPRD kota Serang. Terakhir, adik ipar Ratu Atut menjadi Walikota Tangerang Selatan (Budiyono, 2016).

Pilkada serentak yang dilangsungkan Pada Rabu, 9 Desember Tahun 2020 cukup menarik perhatian dengan beberapa kandidat muncul dari keluarga orang nomor satu Indonesia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Putra Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai wali kota di Solo. Menantu laki-laki Jokowi, Bobby Nasution, mencalonkan diri sebagai wali kota Medan. Kemenangan kedua keluarga Jokowi pada Pilkada Tahun 2020 ini menjadikan keluarga Jokowi bergabung dengan dinasti politik lain yang sudah ada dalam perebutan kekuasaan dan sumber daya.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, tidak

ada syarat atau ketentuan yang melarang keluarga maupun kerabat dari presiden atau pun aparaturnegara untuk mencalonkan diri menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Beberapa contoh fenomena politik dinasti menghadirkan calon dari lingkungan keluarga kepala pemerintahan yang sedang berkuasa atau dilakukan oleh salah satu keluarga ataupun kerabat dekat (KPU, 2021).

Meskipun demikian, menurut sebagian orang, politik dinasti sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi. Dinasti politik di Indonesia adalah suatu hal yang jarang dibicarakan. Padahal, dinasti politik secara sadar maupun tidak sadar sudah menjadi benih dalam perpolitikan di Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Dinasti politik sebenarnya adalah sebuah pola yang ada pada masyarakat modern Barat maupun pada masyarakat yang meniru gaya barat (Bawaslu Provinsi Babel, 2021).

Fenomena politik dinasti perlu diapresiasi oleh berbagai kalangan. Politik dinasti perlu dikaji untuk pembahasan prospek kedepannya. Media menjadi sarana konstruksi dan publikasi guna terbangunnya opini publik dan pembahasan publik atas fenomena politik dinasti tersebut. Hal ini dapat memunculkan gambaran solusi yang diharapkan semua pihak. Meskipun secara undang-undang tidak ada syarat atau ketentuan yang melarang pencalonan tersebut, namun ada sebuah etika politik yang harus menjadi pertimbangan dari fenomena politik dinasti tersebut.

Etika adalah sesuatu yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai sesuatu yang baik dan yang buruk. Ada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat nilai tentang sesuatu yang pantas untuk dilakukan dan tidak pantas untuk dilakukan. Jika dianalisis dari segi etika, politik dinasti tidak baik apabila dilakukan oleh elit politik.

Jika seorang elit politik maju dengan mengandalkan politik dinastinya dan dengan mengesampingkan etika sosial, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus merosot. Rakyat akan menilai adanya sistem nepotisme. Pembentukan politik dinasti akan menciptakan tatanan politik yang tak sehat walaupun menurut undang-undang tidak dilarang, namun hal itu dinilai tidak sesuai dengan etika (Nurwansyah, 2016).

Objek penelitian ini adalah berita tentang politik dinasti Presiden Joko Widodo, di media online kompas.com dan okezone.com. Ada dua alasan yang menjadi pertimbangan pemilihan dua media tersebut, yaitu: pertama, keduanya merupakan media pemberitaan yang bersifat nasional. Media tersebut memiliki komunitas pembaca yang sangat luas baik dari aspek keluasan wilayah maupun segmentasi audiensnya. Kedua, media online tersebut mendukung tereksposnya fenomena politik dinasti dalam pemberitaan di media.

Dari aspek teoritik, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksi realitas dari Peter Berger dan Thomas Luckman. Menurut Luzar (2015),

konstruksi realitas didefinisikan sebagai tahapan sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu atau sekelompok individu, menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Teori ini berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu, yang merupakan manusia bebas.

Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya, yang dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya. Dalam proses sosial, manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya. Menurut Berger dan Luckman, terdapat tiga bentuk realitas sosial. Pertama, realitas sosial eksternalisasi merupakan suatu kompleksitas definisi realitas (termasuk ideologi dan keyakinan) gejala-gejala sosial, seperti tindakan dan tingkah laku yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sering dihadapi oleh individu sebagai fakta. Kedua, realitas sosial objektifikasi merupakan ekspresi bentuk-bentuk simbolik dari realitas objektif, yang umumnya diketahui oleh khalayak dalam bentuk karya seni, fiksi serta berita-berita di media. Ketiga, realitas sosial internalisasi merupakan realitas sosial pada individu, yang berasal dari realitas sosial objektif dan realitas sosial simbolik, merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Hal ini juga bisa disebut dengan bagaimana orang

menyerap apa yang mereka lihat (Luzar, 2015).

Teori konstruksi realitas memiliki tiga proses tahapan yaitu eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi. Pada tahap eksternalisasi, seseorang akan menyesuaikan diri baik secara fisik maupun mental. Pada tahap ini seseorang akan menyesuaikan diri dengan dunia sosiokultural yang merupakan produk dari manusia itu sendiri. Proses selanjutnya yaitu objektivikasi pada tahap ini seseorang telah dapat mengekspresikan dirinya kedalam hubungan sosial masyarakat. Dalam tahap objektivikasi, seseorang mulai berinteraksi dalam dunia yang intersubjektif. Pada tahap internalisasi, seseorang akan mengalami kesadaran sehingga subyektifitasnya dipengaruhi oleh konstruksi sosial disekitarnya. Ketiga tahapan proses tersebut akan selalu ada pada diri seseorang sampai pada akhirnya ia memahami sebuah realitas yang dikonstruksinya (Pratiwi, 2018).

Konstruksi realitas yang diusung tersebut dari tidak dapat dihindari sebab dari awal proses pemilihan berita, sudah ada keberpihakan dalam memilih sudut pandang berita. Misalnya, keberpihakan akan siapa yang akan menjadi narasumber dan pada proses selanjutnya ideologi yang diusung akan mendominasi hasil pemberitaan. Konstruksi realitas sesuai dengan ideologi yang diusung memang tidak dapat dihindari. Namun sebagai pilar keempat demokrasi, nilai-nilai profesional seorang wartawan harus tetap dijunjung tinggi. Media memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mendidik masyarakat

serta memiliki peran sebagai agen perubahan sosial.

Seorang wartawan harus memiliki sensitifitas dalam menulis berita sehingga menimialisir bias dan kepentingan pribadi. Salah satu hal yang harus dipegang teguh oleh seorang jurnalis adalah kebebasan dalam menyampaikan berita dan tidak ada tunggangan kepentingan dari pihak manapun (Winarni & Lestari, 2019). Sejatinnya pekerjaan seorang jurnalis adalah mengkonstruksikan sebuah realitas dimana realiatas tersebut sejalan dengan ideologi wartawan dan juga ideologi media tempat wartawan tersebut bekerja (Sadono & Fensi, 2015).

Melihat latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti berita-berita yang berkembang mengenai politik dinasti Presiden Jokowi pada Pilkada Tahun 2020. Peneliti membuat rumusan masalah, “Bagaimana analisis framing pemberitaan politik dinasti Jokowi pada Pilkada Tahun 2020 di media online kompas.com dan okezone.com?”. Penelitian ini menggunakan analisis framing dengan pendekatan dari Robert N. Entman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penulis menggunakan model analisis framing dari Robert N. Entmant. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dimana kualitatif adalah penelitian yang dapat menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas

sosial, sikap kepercayaan, persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu, Nana Syaodih menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Hamdi & Baharuddin, 2014). Hasil dari penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan dan meringkaskan berbagai kondisi atau berbagai variabel yang timbul pada media massa yang menjadi objek penelitian pemberitaan pemberitaan politik dinasti Presiden Jokowi pada Pilkada tanggal 9 Desember 2020 di media online kompas.com dan okezone.com.

Framing merupakan pemingkakan media dalam menyajikan berita. Analisis framing dapat digambarkan sebagai sebuah analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas (aktor, peristiwa atau kelompok apa saja) dibingkai oleh media. Pemingkakan tersebut dikonstruksi media dan di rekonstruksi oleh masyarakat (Anggoro, 2014). Analisis framing merupakan penelitian yang berfokus untuk meneliti dokumen dimana peneliti akan menganalisis sebuah teks dan bahasa dalam sebuah unit analisis yang telah ditentukan. Analisis framing digunakan untuk membedah ideologi media saat mengkonstruksi sebuah fakta. Analisis framing masuk kedalam paradigma konstruktivisme yang merupakan kritik terhadap paradigma positivisme dimana paradigma ini memiliki pandangan bahwa sebuah teks berita yang dihasilkan sebuah

media merupakan sebuah konstruksi yang sengaja dibentuk oleh media (Sadono & Fensi, 2015).

Peneliti mencermati strategi sebuah media bagaimana sebuah berita diseleksi atau ditonjolkan, bagaimana wartawan menyeleksi isu, sehingga berita menjadi lebih menarik dan membawa dampak dapat menggiring opini khalayak kedalam berita yang disampaikan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis framing dari Robert N. Entman yang merujuk pada pemberian definisi, penjelasan dan evaluasi serta rekomendasi dalam suatu peristiwa yang diwacanakan (Santosa, 2016).

Fokus penelitian ini untuk membatasi studi, sehingga dengan pembatasan studi tersebut akan memudahkan penulis dalam pengelolaan data yang kemudian menjadi suatu kesimpulan. Sesuai masalah yang akan dirumuskan, penulis melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan dari Entman dan ada dua poin fokus penelitian yang ingin ditekankan oleh penulis.

Fokus penelitian pertama adalah seleksi isu. Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung didalamnya ada bagian berita yang dimasukkan (*included*), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan (*excluded*) (Eriyanto, 2011).

Fokus penelitian kedua adalah penonjolan aspek tertentu dari suatu isu. Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu

peristiwa atau isu tersebut dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak (Eriyanto, 2011).

Pengumpulan sumber data yang dianggap relevan dengan objek penelitian terbagi menjadi dua. Pertama, data primer dalam penulisan ini adalah berita politik dinasti Jokowi pada Pilkada tanggal 9 Desember 2020 di media online kompas.com dan okezone.com. pada tanggal 11 Desember 2020. Kedua, data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah data-data yang diperoleh dari metode dokumentasi berupa penelitian kepustakaan (*library research*), yakni mengkaji informasi yang terdapat dalam berbagai literatur, serta yang di download dari situs-situs internet (*website*), jurnal-jurnal online, serta buku-buku yang berkaitan dalam penulisan ini.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan konsep framing yang menekankan pada penonjolan kerangka pemikiran, perspektif, dan konsep tentang memaknai pemberitaan politik dinasti Jokowi pada Pilkada tanggal 9 Desember 2020 di media cetak kompas.com dan okezone.com. Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dengan menggunakan instrumen analisis framing. Dalam pandangan Entman, framing dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapat alokasi penempatan yang lebih

besar dari pada isu lainnya. dengan model Entman melalui empat perangkat (Eriyanto, 2011).

Perangkat pertama adalah *define problems* (definisi masalah). Perangkat ini mengacu pada bagaimana suatu masalah atau isu dilihat, sebagai apa, atau sebagai masalah apa. Perangkat kedua adalah *diagnose cause* (perkiraan masalah dari sumber masalah). Perangkat ini mengacu pada ppa penyebab dari suatu masalah, siapa atau aktor yang dianggap sebagai penyebab mereka (Eriyanto, 2011).

Perangkat ketiga adalah *make moral judgement* (pembuatan keputusan moral). Perangkat ini mengacu pada nilai moral apa yang akan disajikan untuk menjelaskan masalah, serta nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi suatu tindakan. Perangkat terakhir adalah *treatment recommendation* (penyelesaian masalah). Perangkat ini mengacu pada penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu, serta jalan apa yang ditempuh untuk mengatasi masalah (Eriyanto, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Framing Pemberitaan Kompas.com

Pemberitaan pada kompas.com secara jelas menonjolkan berita yang kontra atau tidak setuju adanya politik dinasti yang ada di Indonesia, khususnya pada Pilkada 2020 ini. Terbukti dari pernyataan dari beberapa narasumber yang diwawancarai terhadap

KOMPAS.com - Pilkada 2020 cukup menarik perhatian dengan beberapa kandidat muncul dari keluarga orang nomor satu Indonesia, Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi. Indonesia pada Rabu (9/12/2020) melangsungkan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan lebih dari 100 juta orang berhak memilih pemimpin politik di 270 wilayah. Pilkada ini untuk menentukan gubernur di 9 dari 34 provinsi, bupati di 224 dari 416 kabupaten, dan wali kota di 37 dari 98 kota. Putra pertama Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai wali kota di Solo.

Jika dikonfirmasi menang, Gibran akan menjadi wali kota Solo pada Februari mendatang. Beberapa media asing menyoroti pilkada di Indonesia tahun ini sebagai politik dinasti baru yang akan lahir. Baik Gibran maupun Bobby, keduanya adalah pendatang baru di dunia politik Indonesia. Namun, mereka telah mendapat dukungan partai politik besar, di mana Jokowi berada, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sekalipun melawan kader-kader menjanjikan lainnya yang telah berkiprah di PDI-P lebih lama. "Jika mereka hanya warga negara atau politikus biasa, mereka tidak akan mendapatkan tiket itu dengan mudah," kata Abdil Mughis Mudhoffir, seorang peneliti post-doktoral di Institut Asia Universitas Melbourne, seperti dilansir Bloomberg pada Selasa (8/12/2020).

"Keluarga Jokowi akan bergabung dengan klub dinasti politik lain yang ada dalam perebutan kekuasaan dan sumber daya," lanjut Mudhoffir. "Politik Indonesia akan tetap sama, atau bahkan memburuk karena dinasti dan nepotisme akan menjadi normal baru," terangnya. Para kritikus kini mempertanyakan apakah Jokowi sedang mencoba membangun dinasti politiknya sendiri, dilansir dari Nikkei Asia pada Rabu (9/12/2020). Sementara itu, dinasti politik adalah sebuah gagasan yang ingin Jokowi hindari dengan menjauhkan diri dari ambisi politik putra dan menantunya, melalui penyangkalan klaim apa pun tentang dinasti politik keluarganya itu. Melansir Bloomberg, Gibran sempat menanggapi isu soal dinasti yang sedang tumbuh, dengan mengatakan dia tidak menjamin kemenangan pemilihan. "Ini kontes, bukan janji," katanya setelah pencalonannya diumumkan pada Juli.

"Dinasti politik semakin terbukti sebagai indikator di mana ruang untuk bersaing, meski masih luas, tapi semakin menyempit," imbuh sebagaimana yang dilansir dari Al Jazeera. Aisah Putri Budiatri, Peneliti Pusat Kajian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan pemilu tahun ini menunjukkan "kegagalan parpol dalam merekrut calon kepala daerah berdasarkan kader internal partai". "Banyak dari kandidat berbasis kekerabatan ini bukanlah politisi berpengalaman di bidang pencalonan dan belum membangun jaringan yang mengakar, baik di dalam partai atau dengan komunitas di daerah pemilihan mereka," katanya kepada Al Jazeera. Melansir Inter Press Service pada Selasa (8/12/2020), sarjana komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, berkata, "Prinsip meritokrasi dengan aspek kelayakan dan kompetensi merupakan syarat mutlak untuk mendukung kualitas seorang calon." Sementara, dosen Komisioner Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menegaskan bahwa pengembangan kader partai itu penting. "Beri waktu setidaknya 10 tahun sebelum kader partai menjadi calon eksekutif atau legislatif," ujar Emrus.

Gambar 1. Pemberitaan Kompas.com Tanggal 9 Desember 2020

Sumber: Kompas.com



Gambar 2. Tangkapan Layar Pemberitaan Kompas.com

Sumber: Kompas.com

pemberitaan tentang politik dinasti pada Pilkada 2020, salah satunya adalah Abdil Mughis Mudhoffir, seorang peneliti post-doktoral di Institut Asia Universitas Melbourne. Menurutnya, “Keluarga Jokowi akan bergabung dengan klub dinasti politik lain yang ada dalam perebutan kekuasaan dan sumber daya”, “Politik Indonesia akan tetap sama, atau bahkan memburuk karena dinasti dan nepotisme akan menjadi normal baru”.

Tabel 1. Ringkasan Framing Kompas.com

Perangkat	Konten Pemberitaan
<i>Define Problems</i>	Pada <i>headline</i> berita diceritakan bahwa Pilkada 2020 cukup menarik perhatian dengan beberapa kandidat muncul dari keluarga orang nomor satu Indonesia, Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi.
<i>Diagnose Cause</i>	Isu dinasti politik ini akan selalu hadir di setiap pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) selama belum adanya aturan atau undang-undang yang melarang dinasti politik di Indonesia.
<i>Make Moral Judgement</i>	“Keluarga Jokowi akan bergabung dengan klub dinasti politik lain yang ada dalam perebutan kekuasaan dan sumber daya”, “Politik Indonesia akan tetap sama, atau bahkan memburuk karena dinasti dan nepotisme akan menjadi normal baru”, kata Abdil Mughis Mudhoffir, seorang peneliti post-doktoral di Institut Asia Universitas Melbourne.
<i>Treatment Recommendation</i>	Salah satu solusi dari isu dinasti politik pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) harus ada aturan ataupun undang-undang yang mengatur tentang dinasti politik tersebut, sehingga tidak ada lagi isu tentang dinasti politik di Indonesia ini.

	Kemudian dari Partai Politik juga harus adanya reformasi internal seperti memberikan kesempatan para kader partai yang memang sudah berpengalaman untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tersebut.
--	---

Sumber: Olahan Penulis, 2021

Framing Pemberitaan Okezone.com

Pemberitaan pada okezone.com secara jelas tidak mempermasalahkan adanya politik dinasti pada Pilkada 2020 ini. Terbukti dari pernyataan dari Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam pernyataan tertulisnya mengatakan kemenangan kedua calon PDI-Perjuangan itu merupakan bagian dari komitmen Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk memastikan partai pimpinannya menghasilkan kepemimpinan muda berkualitas. "Kemenangan ini adalah bukti kedaulatan rakyat dalam melihat sosok calon pemimpin daerah. Keduanya menunjukkan semangat dan komitmen yang serius dan teguh, walau banyak upaya menghambat. Misalnya lewat kampanye negatif terkait politik dinasti”.

Tabel 2. Ringkasan Framing Okezone.com

Perangkat	Konten Pemberitaan
<i>Define Problems</i>	Kemenangan putera dan menantu Jokowi pada Pilkada 2020 ini adalah bukti kedaulatan rakyat dalam melihat sosok calon pemimpin daerah. Walau banyak upaya menghambat, misalnya lewat kampanye negatif terkait politik dinasti.
<i>Diagnose Cause</i>	Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, banyak upaya menghambat misalnya lewat kampanye negatif terkait politik

	<p>dinasti. Namun kemenangan pada Pilkada 2020 ini adalah bukti kedaulatan rakyat dalam melihat sosok calon pemimpin daerah.</p>
<i>Make Moral Judgement</i>	<p>Partai PDI Perjuangan tidak memperlakukan terkait dengan isu politik dinasti yang merupakan kampanye negatif. Komitmen Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri untuk menghasilkan kepemimpinan muda yang berkualitas.</p>
<i>Treatment Recommendation</i>	<p>Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, kampanye negatif terkait dengan isu politik dinasti pada Pilkada Tahun 2020. Namun kedaulatan rakyat dalam melihat sosok calon pemimpin daerah. Ini merupakan bagian dari</p>

	<p>komitmen Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk memastikan partai pimpinannya menghasilkan kepemimpinan muda berkualitas.</p>
--	---

Sumber: Olahan Penulis, 2021



Gambar 3. Tangkapan Layar Okezone.com
 Sumber: Okezone.com.

JAKARTA - Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak hari Rabu 9 Desember 2020 yang dilangsungkan di tengah masih terus meluasnya perebakan pandemi virus corona membuat pelaksanaannya berbeda dengan pilkada di tahun-tahun sebelumnya. Sejak awal Ketua KPU Arief Budiman sudah menegaskan keharusan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat mengingat sebagian daerah masuk kategori zona merah dan berisiko tinggi terjadinya penularan Covid-19. Menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, ada 24 daerah penyelenggaraan pilkada yang berstatus zona merah dan 189 daerah masuk kategori berisiko sedang terhadap penularan virus.

“Belum ada hal luar biasa yang dilaporkan terkait kendala logistik. Juga SDM, terutama KPPS karena dibutuhkan petugas yang lebih banyak. Memang beberapa dilaporkan hasil tes-nya reaktif. Saya sudah minta pada KPU Kabupaten/Kota memperhatikan betul protokol kesehatan ini. Kalau mereka tidak bebas dari virus Covid-19 maka saya minta mereka (petugas.red) diganti,” kata Arief Budiman. KPU menyelenggarakan pilkada serentak di 270 daerah untuk memilih gubernur di sembilan dari 34 propinsi, bupati di 224 dari 416 kabupaten dan walikota di 37 dari 98 kota. Diperkirakan ada lebih dari 100 juta warga yang memiliki hak suara. Tetapi sejumlah kota melaporkan jumlah pemilih kurang dari separuh yang terdaftar. Tingginya jumlah warga yang tidak memberikan suara atau dikenal sebagai golput ini memang sudah diperkirakan sebelumnya, tidak saja karena kekhawatiran warga akan perebakan pandemi, tetapi juga sedikitnya pilihan tokoh yang dapat dipilih.

Dinasti Politik Baru

Pilkada 2020 ini juga memunculkan dinasti politik baru dengan keikutsertaan beberapa anggota keluarga orang nomor satu dan nomor dua Indonesia, juga keponakan para mantan pemimpin. Sebut saja putra pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang mencalonkan diri sebagai walikota Solo dan menantu laki-laki Jokowi, Bobby Nasution yang mencalonkan diri sebagai walikota Medan. Penghitungan suara cepat yang dilakukan beberapa lembaga survei menunjukkan Gibran dan Bobby, yang sama-sama pendatang baru di dunia politik namun didukung partai politik besar, memperoleh hampir 90% suara dalam pemilihan hari Rabu.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam pernyataan tertulisnya mengatakan kemenangan kedua calon PDI-Perjuangan itu merupakan bagian dari komitmen Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk memastikan partai pimpinannya menghasilkan kepemimpinan muda berkualitas. "Kemenangan ini adalah bukti kedaulatan rakyat dalam melihat sosok calon pemimpin daerah. Keduanya menunjukkan semangat dan komitmen yang serius dan teguh, walau banyak upaya menghambat. Misalnya lewat kampanye negatif terkait politik dinasti," tukas Hasto. Proses penghitungan suara dan rekapitulasi diperkirakan akan berlangsung hingga 17 Desember, yang diikuti dengan pengumuman dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota antara 13-23 Desember, dan tingkat propinsi antara 16-20 Desember. Penetapan dijadwalkan lima hari setelah rekapitulasi penghitungan suara selesai.

Gambar 4. Pemberitaan Okezone.com Tanggal 11 Desember 2020
 Sumber: Okezone.com

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, berbagai opini publik tentang pemberitaan media massa yang mengungkap isu politik dinasti di lingkup pemerintahan di setiap Pilkada selalu ramai dan menjadi pemberitaan nasional di berbagai media massa. Belum ada aturan atau undang-undang yang membatasi keberadaannya, maka opini menyatakan sah saja adanya politik dinasti dalam jaringan pemerintahan. Sementara di sisi yang lain, bahwa pengembangan politik dinasti dalam jaringan pemerintahan dapat mengurangi nilai demokratisasi dan menutup akses bagi warga masyarakat yang lain terhadap sumber daya pemerintan, maka opini yang muncul, perlu ada aturan main atau undang-undang untuk membatasi politik dinasti agar tidak merusak tatanan demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada.

Pemberitaan pada kompas.com secara jelas menonjolkan berita yang kontra atau tidak setuju adanya politik dinasti yang ada di Indonesia, khususnya pada Pilkada 2020 ini. Terbukti dari pernyataan dari beberapa narasumber yang diwawancarai terhadap pemberitaan tentang politik dinasti pada Pilkada 2020, salah satunya adalah Abdil Mughis Mudhoffir, seorang peneliti post-doktoral di Institut Asia Universitas Melbourne. Menurutnya “Keluarga Jokowi akan bergabung dengan klub dinasti politik lain yang ada dalam perebutan kekuasaan dan sumber daya”, “Politik Indonesia akan tetap sama, atau bahkan memburuk karena dinasti dan nepotisme akan menjadi normal baru”.

Pemberitaan pada okezone.com secara jelas tidak mempermasalahkan adanya politik dinasti pada Pilkada 2020 ini. Terbukti dari pernyataan dari Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam pernyataan tertulisnya mengatakan kemenangan kedua calon PDI-Perjuangan itu merupakan bagian dari komitmen Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk memastikan partai pimpinannya menghasilkan kepemimpinan muda berkualitas. “Kemenangan ini adalah bukti kedaulatan rakyat dalam melihat sosok calon pemimpin daerah. Keduanya menunjukkan semangat dan komitmen yang serius dan teguh, walau banyak upaya menghambat. Misalnya lewat kampanye negatif terkait politik dinasti,”.

Berita dari kedua media online tersebut memperlihatkan bagaimana media mengkonstruksi realitas dan menggiring opini bahwa yang disampaikan adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Padahal sejatinya realitas sosial merupakan buatan manusia dan ditafsirkan lagi oleh manusia. Jadi, konstruksi manusia akan sangat dipengaruhi oleh media yang dikonsumsi. Sedangkan media sangat sulit untuk menyajikan berita sesuai dengan realitas obyektif (Karman, 2015). Sebuah pemberitaan pasti tidak akan bisa lepas dari agenda yang sudah ditetapkan dan disusun oleh pemilik dan pengelola media di level atas, sehingga apapun yang disajikan media tentu adalah sebuah konstruksi yang dibangun oleh pemilik atau pengelola media tersebut. Artinya, tampilan media termasuk isinya adalah suatu konstruksi yang pasti akan disesuaikan dengan apa yang diinginkan.

Narasumber dan pembingkai berita yang dilakukan kedua media online tersebut bukan merupakan representasi dari realitas, namun merupakan pilihan wartawan, pengelola maupun pemilik media, dimana fakta, narasumber, dan peristiwa yang dinarasikan merupakan sebuah realitas yang dikonstruksi. Isi pemberitaan bukanlah suatu barang netral tanpa tujuan atau tanpa maksud ketika dihadirkan di ruang publik. Selalu ada kepentingan media, terhadap isi atau pemberitaan media. Kepentingan ekonomi atau kepentingan politik pemilik dan pengelola media, selalu menjadi kekuatan yang mengatur bagaimana isi media harus ditampilkan, bagaimana realitas harus dikonstruksi atau bagaimana sebuah framing harus dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik framing pemberitaan tentang politik dinasti pada Pilkada 2020 di Indonesia di media online kompas.com dan okezone.com dapat dipaparkan sebagai berikut dengan menggunakan analisa framing model Robert N. Entman.

Menurut perangkat pertama, *define problems* (definisi masalah), pemberitaan yang disampaikan pada media tersebut bukan merupakan kesimpulan dari wartawan yang menuliskan berita, yakni lebih mengedepankan fakta yang disampaikan. Media online kompas.com menyebutkan bahwa para kritikus kini mempertanyakan

apakah Jokowi sedang mencoba membangun dinasti politiknya sendiri. Sementara itu, dinasti politik adalah sebuah gagasan yang ingin Jokowi hindari dengan menjauhkan diri dari ambisi politik putra dan menantunya, melalui penyangkalan klaim apa pun tentang dinasti politik keluarganya itu. Di sisi lain, okezone.com lebih menonjolkan sikap mendukung sesuai pernyataan dari narasumber.

Menurut perangkat kedua, *diagnose cause* (perkiraan masalah dari sumber masalah), kompas.com menyatakan bahwa aktor dari pemberitaan tersebut adalah Abdil Mughis Mudhoffir, seorang peneliti post-doktoral di Institut Asia Universitas Melbourne. Sedangkan okezone.com menyatakan bahwa aktor dari pemberitaan tersebut adalah Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Menurut perangkat ketiga, *make moral judgement* (pembuatan keputusan moral), kompas.com menekankan bahwa politik Indonesia akan tetap sama, atau bahkan memburuk karena dinasti dan nepotisme akan menjadi normal. Penilaian moral okezone.com tidak mempermasalahkan isu politik dinasti yang merupakan kampanye negatif. Komitmen menghasilkan kepemimpinan muda yang berkualitas.

Menurut perangkat keempat, *treatment recommendation* (penyelesaian masalah), kompas.com menyebutkan bahwa salah satu solusi dari isu dinasti politik pada pelaksanaan Pilkada adalah aturan ataupun undang-undang yang mengatur tentang dinasti politik tersebut, sehingga tidak ada lagi isu tentang dinasti

politik di Indonesia ini. Partai Politik juga harus menjalani reformasi internal seperti memberikan kesempatan para kader partai yang memang sudah berpengalaman. Okezone.com mengedepankan kepemimpinan muda berkualitas dan menganggap isu politik dinasti pada Pilkada Tahun 2020 merupakan kampanye negatif.

Setelah melakukan analisis terhadap framing berita diatas, maka penulis menganalisis adanya ketidakberimbangan narasumber yang hanya mewakili satu pihak saja. Dimana kompas.com memilih narasumber yang memang sudah meneliti dan concern terhadap isu dinasti politik, sedangkan okezone.com memilih narasumber dari partai pendukung yang mengajukan aktor dari politik dinasti Pilkada Tahun 2020. Melihat ketidakberimbangan dalam pemilihan narasumber tersebut, maka peneliti memberikan saran kepada kedua media online untuk menambah narasumber pada berita agar berita lebih berimbang dan tidak memihak kepada salah satu sisi saja. Keberimbangan dalam pemilihan narasumber penting agar masyarakat yang melihat dapat memberikan opini yang lebih obyektif dari berita tersebut.

Penulis juga berharap kepada pihak-pihak penyelenggara yang berwenang terhadap Pilkada, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait aturan-aturan kepesertaan atau calon yang berasal dari keluarga maupun kerabat pejabat negara agar kedepannya masyarakat

dapat terinformasi terhadap isu dinasti politik tersebut.

Penulis juga berharap kepada para pemangku kekuasaan agar mengedepankan etika dalam berpolitik, jangan memanfaatkan keadaan atau “*aji mumpung*”. Pembentukan politik dinasti akan menciptakan tatanan politik yang tidak sehat walaupun menurut undang-undang hal itu tak dilarang, namun hal itu dinilai tidak sesuai dengan etika.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, A. D. (2014). Media, Politik dan Kekuasaan (Analisis Framing Model Robert N. Entman tentang pemberitaan hasil pemilihan Presiden, 9 Juli 2014 di TV One dan Metro TV). *ARISTO*, 2(2): 25–52.
- Badan Pengawas Pemilu Provinsi Babel. (2021). Diambil 3 Januari 2021 dari: bawaslu-babelprov.go.id
- Bathoro, Alim. (2011). Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal FISIP UMRAH*, 2(2): 115-125.
- Budiyono, B. (2016). Politik Dinasti dalam Pemberitaan Media: Analisis Framing Isu Politik Dinasti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah Pada Harian Kompas dan Koran Tempo. *Jurnal IPTEK-KOM*, 18(2): 160-173.
- Eriyanto, (2011). “*Analisis Framing*”: Konstruksi Ideologi, dan Politik Media. Yogyakarta: Lkis.
- Hamdi, A.S. & Baharuddin, E. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta, CV Budi Utama.
- Herman, M., & As’ad, M. U. (2019, October). Local Elections, Local Actors and Political Patronage Networks: Understanding Involvement of Coal Mining Bosses in the Local Elections in

- South Kalimantan Province. In *IAPA Proceedings Conference* (pp. 228-247).
- Karman, K. (2015). Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoretis terhadap Konstruksi Realitas Peter L. Berger). *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, 5(3): 11-23.
- Komisi Pemilihan Umum. (2021). Diambil 3 Januari 2021 dari: <https://kpu.go.id>
- Komisi Pemilihan Umum. 2020. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Luzar, L.C. (2015, 18 Mei). "Teori Kontruksi Realitas Sosial". Diambil 12 Januari 2021 dari: <https://dkv.binus.ac.id/2015/05/18/teori-konstruksi-realitas-sosial/>
- Nurwansyah, Y. (2016). Diambil 12 Januari 2021 dari: <https://babel.bawaslu.go.id/kekuasan-dinasti-politik>
- Pratiwi, A. (2018). Konstruksi Realitas Dan Media Massa: Analisis Framing Pemberitaan LGBT Di Republika Dan BBC News Model Robert N. Entman. *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam*, 19(1), 50–71.
- Republik Indonesia. 2020. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
- Sadono, T. P., & Fensi, F. (2015). Pemberitaan Bergabungnya Hary Tanoesoedibjo Ke Partai Hanura (Analisis Ekonomi Politik Media Dalam Framing Portal Online Okezone.com dan Metrotvnews.com). *Jurnal Bricolage*, 1(1): 1–28.
- Santosa, R. (2016). Analisis Framing Pemberitaan Etnis Tionghoa dalam Media Online Republika di Bulan Februari 2016. *Jurnal E-Komunikasi*, 4(1).
- Winarni, N., & Lestari, R. D. (2019). Netizen News Sources in the Journalistic Ethics Perspective (Case Study in Online Media Jogja.tribunnews.com). *Journal Pekommas*, 4(1): 85.